



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2022**

## KATA PENGANTAR

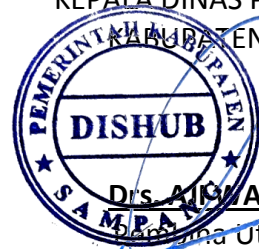
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sampang Tahun 2021 telah diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2021, merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk pertanggung jawaban kinerja juga kepada masyarakat Kabupaten Sampang secara tertulis.

Penyusunan LKjIP ini dapat terlaksana berkat adanya kerjasama yang baik dari para Stakeholders dilingkungan Organisasi Perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang penyusunan LKjIP berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi ( LAN ) Nomor : 239/IX/6X8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya meningkatkan baik dalam penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya kami berharap semoga LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sampang dalam upaya untuk melakukan peningkatan pencapaian kinerja.

Sampang, Januari 2022  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAMPANG



Drs. ARIWALUYO, M.Si  
Kepala Utama Muda  
NIP. 19630401 198303 1 006

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Umum .....	1
B. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Sampang .....	3
C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sampang .....	4
D. Isu Strategis.....	13
E. Cascading Dinas Perhubungan Kab. Sampang .....	14
F. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kab. Sampang .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
Perencanaan Kinerja.....	18
<b>BAB III AKUNTABILITS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup.....	29

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Sampang.....	21
Tabel 2.2 Program Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Sampang .....	19
Tabel 2.3 Realisasi Keuangan sesuai Sasaran Strategis Dishub Kab. Sampang .....	20
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja RPJMD .....	22
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra .....	22
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Sampang Tahun 2021 .....	23

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dishub Kab. Sampang .....	4
Bagan 1.2 Cascading Kinerja Dishub Kab. Sampang .....	14
Bagan 1.3 Proses Bisnis Dishub Kab. Sampang .....	16
Bagan 1.4 Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	16



# BAB I PENDAHULUAN

## A. UMUM

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan



## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD 2019-2024 yang didukung oleh Dinas Perhubungan diantaranya :



## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

“Membangun infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

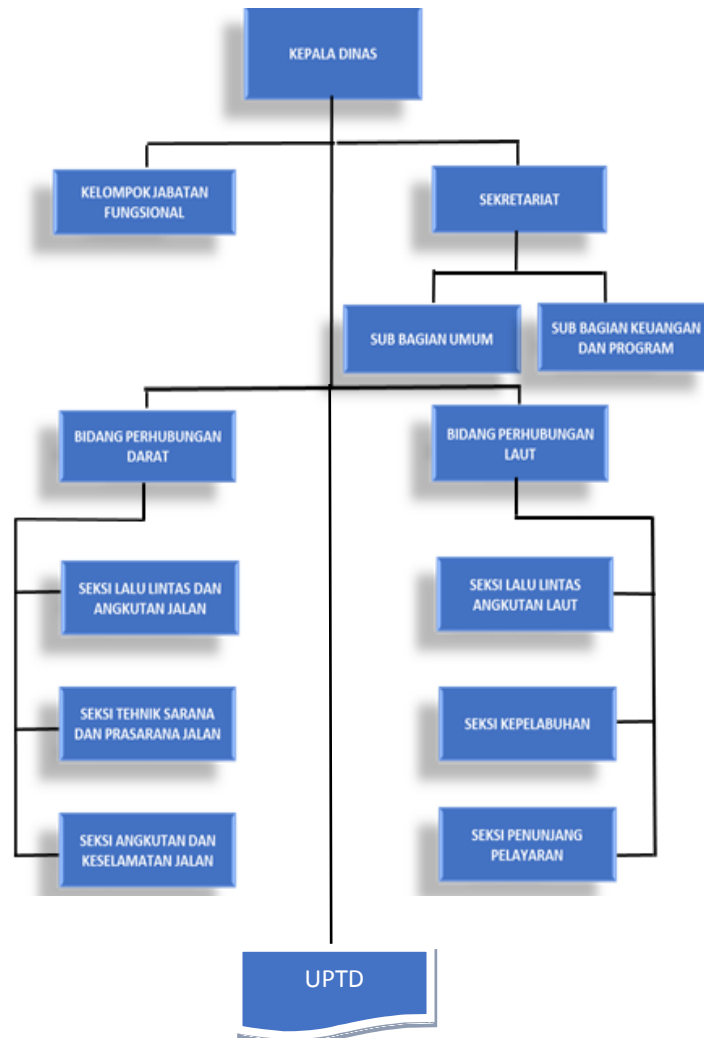
### **B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Perhubungan terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas dan 2 Bidang Perhubungan yaitu Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 dengan bagan sebagai berikut :





**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMPANG**



**C. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN**

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membagi secara terinci kepada Kepala Bidang yang mempunyai Fungsi dan uraian tugas masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut:



## **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah

## **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, sumber daya manusia, keuangan, program dan perencanaan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas

### **Sekretaris Mempunyai Fungsi :**

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- 6) Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- 10) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- 11) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- 13) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



**Sekretaris Membawahi :**

**a) Sub Bagian Umum**

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolanan;
- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

**b) Sub Bagian Keuangan Dan Program**

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;



## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **3. Kepala Bidang Perhubungan Darat**

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang lalu lintas jalan, teknik sarana prasarana jalan, juga angkutan dan keselamatan Jalan.

#### **Bidang Perhubungan Darat Mempunyai Fungsi :**

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan darat;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis bidang perhubungan darat;
- 3) Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kinerja lalu lintas jalan;
- 4) Penyusunan rencana dan program bidang teknik sarana prasarana jalan;
- 5) Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan dan keselamatan Jalan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Bidang Perhubungan Darat Membawahi :**

##### **a). Seksi Lalu Lintas Jalan ( LLAJ )**

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;
- Mengumpulkan data dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis seksi lalu lintas jalan dan perparkiran;



## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

- Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
- Melaksanakan kegiatan Kajian Lalu Lintas, Manajemen Rekayasa Lalu lintas dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- Melaksanakan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- Melaksanakan penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyidikan pelanggaran ketentuan Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan;
- Menyiapkan draf regulasi bidang lalu lintas dan perparkiran;
- Memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan forum lalu lintas angkutan jalan;
- Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi kinerja lalu lintas jalan;
- Melaksanakan pengolahan data dan pembinaan tempat khusus parkir;
- Melaksanakan pengadaan, pembinaan, pengelolaan lokasi, pengoperasian dan penetapan tarif parkir tepi jalan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengoperasian fasilitas tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat.

### **b). Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan**

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi angkutan dan keselamatan jalan;
- Mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis bidang manajemen angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus;



## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

- Mengumpulkan bahan pembinaan dan pengendalian angkutan barang, angkutan orang dan angkutan khusus
- Mengumpulkan bahan fasilitasi dan koordinasi pemberian ijin dispensasi melintas jalan kabupaten bagi angkutan barang umum, alat berat khusus dan barang berbahaya;
- Menetapkan tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Sampang;
- Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan;
- Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan umum dalam satu Kabupaten
- Memberikan rekomendasi perijinan angkutan transportasi orang dan barang;
- Melaksanakan pemberian ijin trayek perdesaan, kartu pengawasan dan ijin insidental serta surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor;
- Melaksanakan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- Mengumpulkan bahan dan pengolahan data analisis konflik rawan kecelakaan lalu lintas serta menyiapkan langkah-langkah preventif terhadap kecelakaan lalu lintas; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat

### **c). Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana Jalan (TSP)**

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi teknik sarana prasarana jalan;
- Melaksanakan survey penentuan lokasi dan penempatan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana prasarana jalan;
- Menyusun dan membuat draf regulasi penentuan lokasi dan penempatan sarana prasarana jalan;
- Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sarana prasarana jalan;
- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kerja penerangan jalan umum (PJU);



- Melaksanakan pendataan, inventarisasi pemasangan lampu penerangan jalan umum;
- Melaksanakan analisis tagihan rekening listrik penerangan jalan umum;
- Melaksanakan inventarisasi pemeliharaan serta perbaikan penerangan jalan umum;
- Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang fungsi dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat

#### **4. Kepala Bidang Perhubungan Laut**

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan pelayaran, ijin usaha pelayaran, trayek angkutan laut dan dokumen kapal serta menyiapkan sarana bidang perhubungan laut.

##### **Bidang Perhubungan Laut Mempunyai Fungsi :**

- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut, kepelabuhan, kegiatan penunjang keselamatan dan pelayaran;
- Pelaksanaan rencana dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan Laut;
- Pelaksanaan kebutuhan sarana perhubungan laut;
- Pelaksanaan pembinaan penunjang pelayaran;
- Pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha pelayaran rakyat dan angkutan laut;
- Pelaksanaan penetapan besarnya tarif angkutan laut;
- Pelaksanaan penetapan trayek Angkutan Laut dan Perintis; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



**Bidang Perhubungan Laut Membawahi :**

**a). Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut**

- Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- Menyiapkan bahan pemberian izin usaha angkutan sungai dan danau perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten.
- Menyiapkan bahan rencana penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau serta penetapan lintas penyeberangan (trayek).
- Menyiapkan bahan pemberian ijin trayek penyelenggaraan angkutan laut, sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten;
- Menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan laut, sungai dan danau;
- Melakukan operasi laut dalam rangka kelancaran lalu lintas dan angkutan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi lalu lintas bidang perhubungan laut; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut.

**b). Seksi Kepelabuhan**

- Menyiapkan bahan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal ;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Dermaga Kapal;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian dan Pengawasan kegiatan pengusaha, pengelolaan pelabuhan,





## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

pengelolaan dermaga dan pengawasan pelabuhan serta pelayanan retribusi pengelolaan pelabuhan;

- Menyiapkan bahan penetapan rekomendasi izin keruk dan reklamasi pada perairan di wilayah pelabuhan pengumpan lokal;
- Memberikan ijin usaha bagi badan usaha pelabuhan di lingkungan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- Menyiapkan bahan penerbitan ijin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal;
- Menyiapkan bahan rencana pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut

### c). Seksi Penunjang Pelayaran

- Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan dokumen dan perpanjangan sertifikasi registrasi kapal tonase kurang dari 7 *Gross Tonnage* (GT );
- Menerbitkan Pas Kecil Kapal tonase kotor sama dengan atau kurang dari 7 GT yang berlayar di laut, sungai dan danau;
- Menyiapkan bahan pembinaan, manajemen, pengawasan dan koordinasi penerapan standar dan perizinan laik laut serta pedoman keselamatan kapal;
- Melaksanakan survey penentuan lokasi penempatan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana prasarana kenavigasian bidang perhubungan laut; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut.

### 3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan UPTD Perhubungan



## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

- b. UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- c. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- d. Memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- d. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **D. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

Hasil analisa isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang diantaranya :

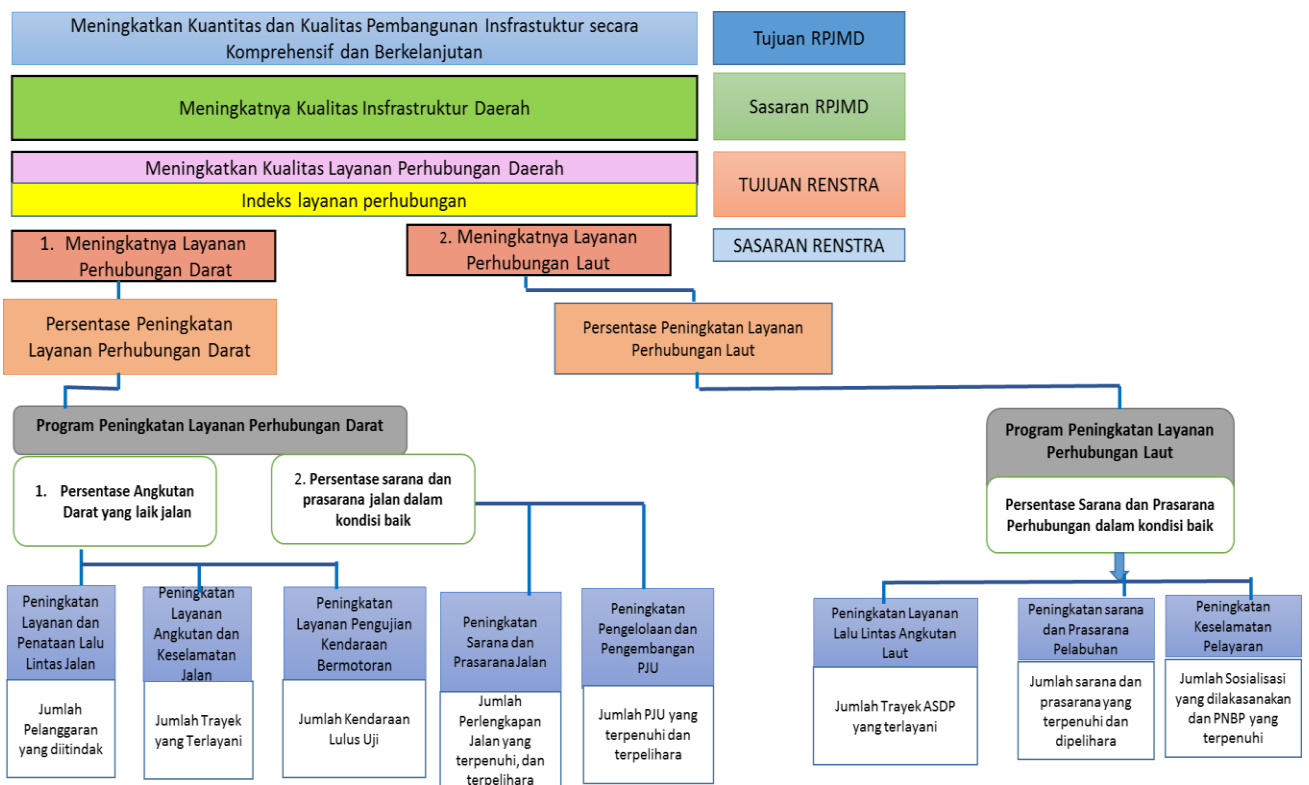
- a. Masih Tingginya Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas
- b. Masih Rendahnya Pemenuhan Standart Keselamatan Bagi Pengguna Jalan;
- c. Minimnya Perlengkapan Jalan
- d. Rendahnya Konektivitas Transportasi Bagi Masyarakat Kepulauan Dan Daerah Terpencil.



### E. CASCADING DINAS PERHUBUGAN

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dansasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

### CASCADING



### F. PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUGAN

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang



## **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

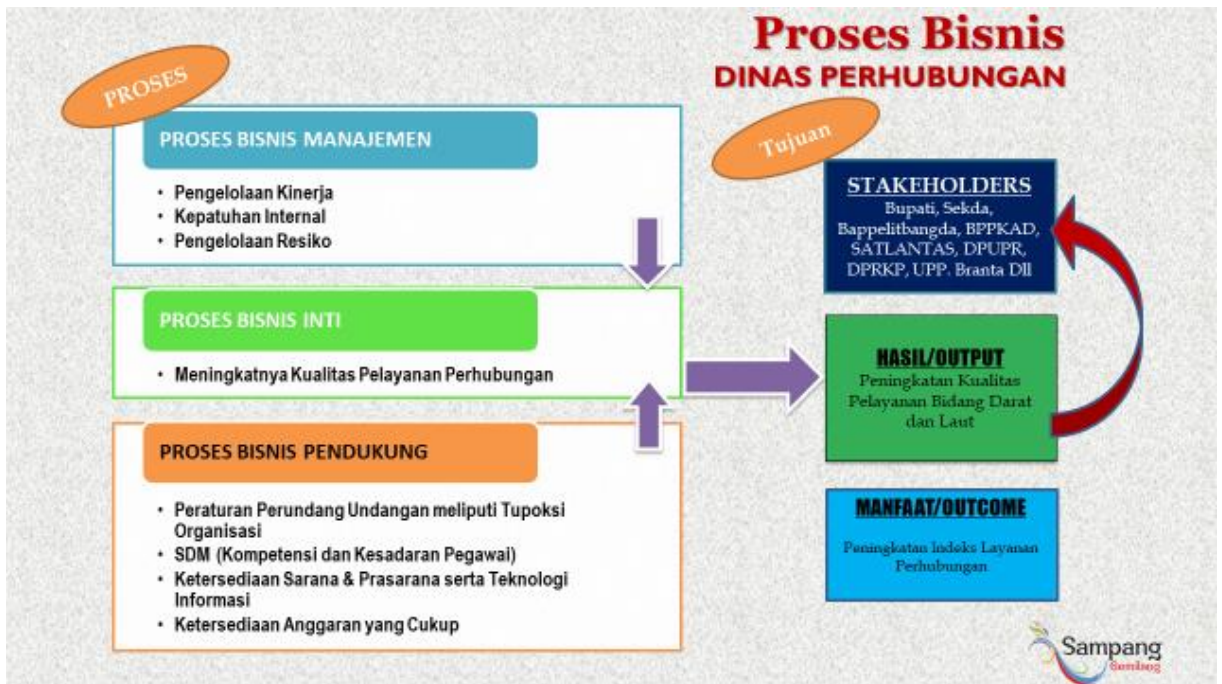
Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

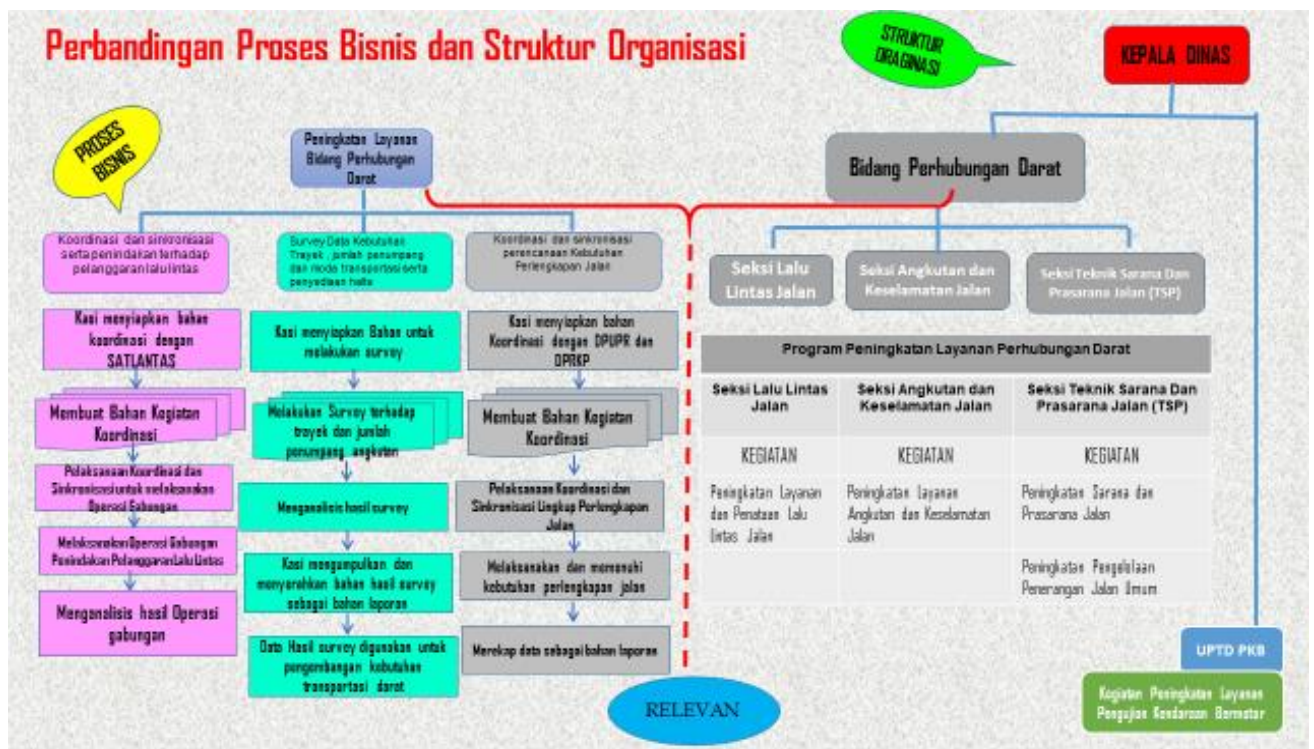


Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang :



Perbandingan Peta Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi:

Peta Proses Bisnis Bidang Perhubungan Darat:





Peta Proses Bisnis Bidang Perhubungan Laut:







## BAB II

# Perencanaan Kinerja

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2021:

	Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Darat	6,04%	Bidang Darat
	Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan Laut	2,50%	Bidang Laut



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sampang Tahun 2021 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 27.005.727.215 yang digunakan untuk melaksanakan 43 sub kegiatan dari 18 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	<b>5.874.428.063</b>
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<b>20.692.874.530</b>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>438.424.622</b>
<b>Jumlah</b>	<b>27.005.727.215</b>

Rincian Anggaran perkegiatan disajikan dalam bab III (table 3.3). Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 3 sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tahun 2021 dengan alokasi sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perhubungan	<b>5.874.428.063</b>
Meningkatnya Layanan Perhubungan Darat	<b>20.692.874.530</b>
Meningkatnya Layanan Perhubungan Laut	<b>438.424.622</b>
<b>Jumlah</b>	<b>27.005.727.215</b>

*Sumber anggaran Dinas Perhubungan Kab. Sampang seluruhnya dari APBD*





# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran dan juga cara membandingkan antara realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

A. Realisasi Indikator Tujuan Renstra tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tujuan Renstra			Realisasi	Tahun 2020		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks layanan perhubungan	%	7,30	8,00	8,18	102,25

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Tujuan Renstra

Dari tabel capaian sasaran di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam peningkatan kualitas infrastruktur daerah dengan indikator Indeks Layanan Perhubungan tercapai 8,18% dari target 8,00 atau 102,25%, dengan layanan perhubungan ini masyarakat belum puas dikarenakan masih banyak sarana dan prasarana yang belum dapat dipenuhi, terutama dalam hal pemenuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta perlengkapan jalan/ alat keselamatan jalan seperti rambu-rambu dll.

B. Realisasi Indikator Kinerja Renstra tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Sasaran Renstra			Realisasi	Tahun 2021		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya layanan perhubungan darat	1. Presentase peningkatan layanan perhubungan darat	%	3,76	6,04	6,97	115,40
2. Meningkatnya layanan perhubungan laut	2. Presentase peningkatan layanan perhubungan laut	%	15,38	2,50	2,50	100

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Renstra

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada indikator persentase peningkatan layanan perhubungan darat sudah mencapai target dimana indikator ini diperoleh dari pemenuhan perlengkapan jalan terdiri dari Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu-rambu lalu lintas serta pemeliharaan perlengkapan jalan.
2. Pada indikator Persentase peningkatan layanan perhubungan laut sudah mencapai target meskipun pelaksanaannya hanya pemenuhan pemeliharaan



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

prasarana pelabuhan sedangkan untuk peningkatan prasarana perhubungan laut untuk tahun ini tidak ada.

### B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Penganggaran program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2021 dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan anggaran dan realisasi belanja Dinas Perhubungan Kab. Sampang tahun 2021 sebagai berikut:

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2021									
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG									
No	URAIAN	Alokasi Biaya							
		Anggaran	Realisasi	%					
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.877.797.500	3.018.734.900	104,90%					
	1. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	2.500.000.000	2.557.162.100	102,29%					
	2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	277.647.500	337.380.000	121,51%					
	3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.000.000	26.200.000	187,14%					
	4. Retribusi Terminal	5.000.000	4.950.000	99,00%					
	5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	70.000.000	79.928.000	114,18%					
	6. Retribusi Izin Trayek	1.150.000	50.000	4,35%					
	7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: - Pendapatan Denda Retribusi PKB	10.000.000	13.064.800	130,65%					
No	URAIAN	Alokasi Biaya			Output/Keluaran				
		Anggaran	Realisasi	%	Uraian	Target	Realisasi	%	
B	BELANJA LANGSUNG (BL)	27.005.727.215	26.288.897.954	97,35%					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	5.874.428.063	5.693.832.315	96,93%	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100	%	100	100%



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.762.464</b>	<b>21.415.356</b>	<b>98,41%</b>	<b>Persentase Laproran Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.418.641	2.223.616	91,94%	Penyusunan Renja dan perubahan Renja Dishub Kab. Sampang yg disusun	2	dok	2	100%
					Penyusunan Renstra Dishub Kab. Sampang yg disusun	1	dok	1	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.452.500	2.447.040	99,78%	Jumlah dokumen RKA yg disusun	1	dok	1	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.999.785	2.927.360	97,59%	Jumlah penyusunan perubahan RKA yg disusun	1	dok	1	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.999.858	2.990.940	99,70%	Jumlah dokumen DPA yg disusun	1	dok	1	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.356.418	2.313.720	98,19%	Jumlah penyusunan perubahan DPA yg disusun	1	dok	1	100%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.535.262	8.512.680	99,74%	Jumlah penyusunan LPPD, LKPj, LKjIP, SAKIP yg disusun	4	dok	4	100%
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.595.437.796</b>	<b>4.472.358.259</b>	<b>97,32%</b>	<b>Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.528.294.298	4.406.304.762	97,31%	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	14	bulan	14	100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.478.600	60.576.853	98,53%	Jumlah ATK	2.596	buah	2.320	89%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.425.872	1.331.656	93,39%	Jumlah penyediaan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12	bulan	12	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.099.667	2.081.380	99,13%	Jumlah penyusunan laporan akhir tahun yg disusun	1	laporan	1	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	2.139.359	2.063.608	96,46%	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan yg disusun	12	laporan	12	100%
					Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran yg disusun	2	laporan	2	100%
					Jumlah penyusunan laporan keuangan triwulanan yg disusun	4	laporan	4	100%
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.999.800</b>	<b>3.949.196</b>	<b>98,73%</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.999.925	1.955.936	97,80%	Jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang	2	laporan	2	100%
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1.999.875	1.993.260	99,67%	Jumlah laporan barang milik daerah	2	laporan	2	100%



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

4	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	1.504.625	1.483.680	98,61%	<b>Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah</b>	100	%	100	100%
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	747.650	742.600	99,32%	Jumlah perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1	laporan	1	100%
2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	756.975	741.080	97,90%	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12	laporan	12	100%
5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	15.008.000	10.440.000	69,56%	<b>Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD</b>	100	%	50%	50%
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	0	0	#DIV/0!	<i>Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya</i>	0	org	0	#DIV/0!
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.008.000	10.440.000	69,56%	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6	OK	3	50%
6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	546.525.018	535.761.265	98,03%	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100	%	100	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.841	19.878.765	99,41%	Jumlah komponen instalasi listrik	352	buah	335	95%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.106.665	45.711.467	99,14%	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi	4	jenis	4	100%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	354.618.512	350.063.984	98,72%	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	jenis	6	100%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.560.000	86,67%	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12	exemplar	12	100%
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.600.000	3.546.400	98,51%	Penyediaan makanan dan minuman tamu	90	hari	121	134%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.404.000	115.000.649	95,51%	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	96	OK	96	100%
					Jumlah rapat Perjalanan Dinas Biasa	68	OK	88	129%
					Jumlah Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kota	28	OK	39	139%
7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	130.000.000	129.988.000	99,99%	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100	%	100	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	120.000.000	100,00%	Jumlah pengadaan sewa kendaraan dinas roda 4	1	unit	1	100%
	<i>Pengadaan Mebel</i>	0	0	#DIV/0!	<i>Jumlah kursi kerja staf yg terpenuhi</i>	0	unit	0	#DIV/0!
					<i>Jumlah kursi pejabat yg terpenuhi</i>	0	unit	0	#DIV/0!
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.988.000	99,88%	Jumlah Tandon Air Bawah Tanah	1	unit	1	100%
					Jumlah AC Split yang terpenuhi	0	unit	0	#DIV/0!
					Jumlah CCTV yg terpenuhi	0	unit	0	#DIV/0!
					Jumlah Drone yang terpenuhi	0	unit	0	#DIV/0!



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

					Jumlah Laptop ROG yang terpenuhi	0	unit	0	#DIV/0!
					Jumlah laptop yang terpenuhi	0	unit	0	#DIV/0!
					Jumlah Mesin Finger print yang terpenuhi	0	unit	0	#DIV/0!
					Jumlah Printer yang terpenuhi	0	unit	0	#DIV/0!
8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>329.090.424</b>	<b>324.965.434</b>	<b>98,75%</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.153.452	5.803.225	71,18%	Jumlah surat terkirim	700	surat	716	102%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.936.972	115.162.209	98,48%	Jumlah pembayaran listrik, air dan komunikasi	12	bulan	12	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.000.000	204.000.000	100,00%	Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan, satpam, penjaga malam	12	bulan	12	100%
9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>231.099.936</b>	<b>193.471.125</b>	<b>83,72%</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.400.000	141.757.610	81,75%	Jumlah kapal speed boat yang dipelihara	1	unit	0	0%
Jumlah kendaraan dinas operasional yg dipelihara					10	unit	10	100%	
Jumlah perizinan kendaraan dinas operasional					40	unit	40	100%	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.460.800	97,84%	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	32	unit	32	100%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.699.936	27.252.715	83,34%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	unit	4	100%
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>20.692.874.530</b>	<b>20.190.857.352</b>	<b>97,57%</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam kondisi baik</b>	<b>88,04</b>	<b>%</b>	<b>88,92</b>	<b>101%</b>
					<b>Persentase angkutan darat yg laik jalan</b>	<b>98,96</b>	<b>%</b>	<b>86,88</b>	<b>87,79%</b>
1	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>17.522.990.893</b>	<b>17.169.726.509</b>	<b>97,98%</b>	<b>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.230.345.776	9.205.888.145	99,74%	Jumlah marka yg terpenuhi	6	paket	6	100%
Jumlah PJU yg terpasang					518	PJU	518	100%	
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yg terpenuhi					65	unit	72	111%	
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.292.645.117	7.963.838.364	96,03%	Jumlah PJU yg terpelihara	450	panel	450	100%
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yg terpelihara					1	paket	1	100%	
Jumlah rekening listrik PJU yg terbayar					12	bulan	12	100%	
Jumlah traffic light yg terpelihara					6	unit	6	100%	
Jumlah warning light yg terpelihara					29	unit	29	100%	
2	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>50.285.486</b>	<b>38.294.450</b>	<b>76,15%</b>	<b>Persentase ketersediaan pengelolaan terminal penumpang tipe C</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	50.285.486	38.294.450	76,15%	Jumlah Dokumen FS Terminal Sampang	0	dok	0	#DIV/0!
					Jumlah dokumen naskah akademik yg disusun	0	dok	0	#DIV/0!
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	0	dok	0	#DIV/0!
					Jumlah Pembebasan Tanah yang Dilaksanakan	0	paket	0	#DIV/0!
3	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>764.817.828</b>	<b>706.001.342</b>	<b>92,31%</b>	<b>Persentase Ketersediaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	764.817.828	706.001.342	92,31%	Jumlah parkir berlangganan yg dilaksanakan	12	bulan	12	100%
					Jumlah Sosialisasi Juru Parkir Berlangganan yang dilaksanakan	3	kali	3	100%
4	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>232.109.894</b>	<b>230.645.722</b>	<b>99,37%</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	139.375.578	138.003.350	99,02%	Jumlah pengadaan bahan baku operasional pelayanan	12	bulan	12	100%
					Jumlah pengembangan aplikasi yg dilaksanakan	1	paket	1	100%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	92.734.316	92.642.372	99,90%	Jumlah alat yg terpelihara	12	alat	12	100%
					Jumlah kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor yg dilaksanakan	9	alat	9	100%
5	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>622.670.429</b>	<b>556.189.334</b>	<b>89,32%</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	622.670.429	556.189.334	89,32%	Jumlah dokumen manajemen rekayasa lalu lintas yg disusun	1	dok	1	100%
					Jumlah operasi sadar tertib lalu lintas yg dilaksanakan	18	kali	18	100%
					Jumlah PAM insedentil	15	kali	16	107%
					Jumlah PAM lebar yg dilaksanakan	16	hari	16	100%
					Jumlah pengamanan Car Free Day	0	kali	0	#DIV/0!
					Jumlah pengamanan Natal dan tahun baru	10	hari	10	100%
6	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.489.999.995</b>	<b>99,33%</b>	<b>Persentase Ketersediaan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.489.999.995	99,33%	Jumlah pengadaan transportasi darat mini bus	3	unit	3	100%
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>438.424.622</b>	<b>404.208.287</b>	<b>92,20%</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut dalam kondisi baik</b>	<b>57,14</b>	<b>%</b>	<b>57,14</b>	<b>100%</b>



## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

1	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	151.023.095	118.393.020	78,39%	<b>Persentase Ketersediaan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota</b>	100	%	100	100%
1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota	53.253.095	51.959.500	97,57%	Jumlah aplikasi untuk data kapal dan penumpang maupun barang dan kendaraan	0	paket	0	#DIV/0!
2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.770.000	66.433.520	67,95%	Jumah pemanasan mesin speedboat Trunojoyo	2	mesin	2	100%
					Jumlah kru speedboat dalam kegiatan operasional	12	bulan	12	100%
					Jumlah kunjungan kerja pejabat	2	kali	2	100%
					Jumlah pengamanan prefentif arus mudik - arus balik penumpang kapal di Pelabuhan	6	hari	6	100%
					Jumlah kapal dalam jaringan trayek ASDP dan tarif penyeberangan ASDP untuk penumpang, barang dan kendaraan	0	paket	0	#DIV/0!
2	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	57.951.527	56.776.267	97,97%	<b>Persentase Ketersediaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	100	%	100	100%
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.565.000	1.565.000	100,00%	Jumlah izin penetapan lokasi yg terpenuhi	0	dok	0	#DIV/0!
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	56.386.527	55.211.267	97,92%	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yg terpenuhi	0	paket	0	#DIV/0!
3	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	229.450.000	229.039.000	99,82%	<b>Persentase Ketersediaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	100	%	100	100%
1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	229.450.000	229.039.000	99,82%	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PJU yang terpenuhi	6	PJU	6	100%
	<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungaidan Danau</i>	0	0	#DIV/0!	<i>Jumlah sarana dan prasarana dermaga / tambatan perahu yang dipelihara</i>	0	<i>paket</i>	0	#DIV/0!
<b>JUMLAH (BTL+BL)</b>		<b>27.005.727.215</b>	<b>26.288.897.954</b>	<b>97,35%</b>					

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2021





## DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

### 1. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, sebagaimana sebagai berikut :

#### a. Permasalahan

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2021 terdapat 2 (dua) program yang realisasinya dibawah 80%. Program tersebut adalah sebagai Berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah:
  - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, realisasinya masih 69,56%, hal ini dikarenakan belum dimaksimalkan PNS yang ikut diklat yang sesuai dengan kompetensi Pegawai Dinas Perhubungan.
  - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebesar 71,18% dikarenakan rapat koordinasi ke kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan
2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ):
  - Untuk kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C terealisasi sebesar 76,15% karena pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
3. Program pengelolaan pelayaran:
  - Untuk kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kab./Kota terealisasi sebesar 67,95% karena disesuaikan dengan kebutuhan.

#### b. Solusi

1. Koordinasi dengan pihak Kementerian untuk menginformasikan penawaran diklat lebih awal sehingga Pemerintah Daerah bisa ada persiapan dan mencari informasi melalui berbagai media internet melalui website diklat. Hal ini dilakukan agar pada anggaran 2022 tidak terulang dan bisa mengirim ASN Dishub untuk melaksanakan Diklat demi peningkatan SDM di Dinas Perhubungan Kab. Sampang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Tahun 2021, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Perhubungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.